

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil, serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarganya. UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional, karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2015, Indonesia menghadapi *Asean Economic Community (AEC)*, dimana persaingan pasar akan semakin tinggi bagi pelaku UMKM. Jika UMKM tidak melakukan inovasi dan pengembangan usahanya, maka bisa jadi banyak pelaku UMKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing secara internasional dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, termasuk tersedianya kebijakan berpihak pada pengembangan UMKM.

Untuk pengembangan tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Sebagian besar UMKM hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usahanya, dan tidak ada pemisahan uang pribadi dengan uang perusahaan. Padahal, untuk mengembangkan sebuah usaha menjadi lebih baik dibutuhkan yang cukup besar dan pemisahan antara dana pribadi dengan dana perusahaan. Oleh sebab itu, tidak hanya modal pribadi saja yang dibutuhkan tetapi juga dana yang berasal dari pinjaman pihak ketiga seperti bank, KUR dan sejenisnya (Tuti dan Dwijayanti, 2015).

Namun adanya persyaratan peminjaman yang diberikan oleh pihak kredit. Salah satu syaratnya yaitu laporan keuangan UMKM yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Akan tetapi, banyak UMKM yang tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya. Penyebabnya yaitu UMKM yang terlalu fokus ada proses produksi dan operasionalnya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan (Tuti dan Dwijayanti, 2015).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sebagai penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, menyadari bahwa untuk mengatasi kendala yang dihadapi UMKM diperlukan standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK umum berbasis IFRS. Oleh karena itu, pada tahun 2009, DSAK IAI menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP :2018).

SAK ETAP merupakan pilar kedua standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah SAK Umum berbasis IFRS. SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik sebagaimana telah dijelaskan dalam ruang lingkup SAK ETAP, termasuk UMKM. SAK yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat, menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Dengan ditetapkannya SAK ETAP mempermudah pelaku UMKM untuk menyusun dan mencatat laporan keuangannya untuk mengetahui posisi keuangannya. Di Indonesia sendiri telah ditetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan usaha kecil untuk melakukan pencatatan akuntansi baik yaitu

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah membuat Standar Akuntansi bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jika dilihat dari tingkat kekompleksitasannya, SAK ETAP lebih mudah untuk dipahami jika dibandingkan dengan PSAK lainnya. Selain itu, SAK ETAP ini juga lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK pada umumnya. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pertama kali diterbitkan pada 17 Juli 2009 diberlaku efektif 1 Januari 2011.

Dalam setiap perusahaan tidak semuanya menerapkan SAK ETAP karena disebabkan oleh banyak hal, yaitu Pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi, tidak memiliki tenaga ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai standar, adanya persepsi bahwa pembukuan tidak penting dalam usahanya, persepsi bahwa akuntansi terlalu rumit untuk dilakukan hingga tidak ada pemisahan dana pribadi dan dana yang digunakan dalam proses bisnis. Oleh karena itu mereka enggan menerapkan pembukuan (Hutagaol, 2012:74).

Selain itu pemahaman tentang SAK ETAP juga dipengaruhi tingkat pendidikan pemilik UMKM. Pemilik adalah orang yang memiliki bisnis, yang menanamkan uangnya dalam bisnis tertentu dan juga menjalankan karena mereka mengharapkan adanya pendapatan dalam bentuk keuntungan dari bisnis tersebut. Semakin tinggi pendidikan pemilik, maka pemahaman mengenai bisnis juga semakin baik. Tingkat Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal pemilik,

yaitu pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah pemilik, yaitu pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah formal antara lain: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma dan Sarjana (Mulyaga, 2016).

Sosialisasi SAK ETAP adalah sosialisasi yang didapatkan oleh pemilik UMKM mengenai SAK ETAP yang merupakan usaha yang diberikan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan sosialisasi SAK ETAP seperti Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UMKM, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), atau lembaga lainnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi pencatatan akuntansi dan pemahaman tentang SAK ETAP, UMKM untuk kedepannya dapat membuat laporan keuangan yang baik, sehingga dapat mempermudah UMKM dalam mencapai akses bank dan pinjaman lainnya untuk mengembangkan usaha mereka. Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, hasil dari laporan keuangan tersebut menjadi hasil akhir dari suatu proses akuntan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Skala Usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total asset, berapa jumlah karyawan yang diperkerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jumlah karyawan yang diperkerjakan dapat menggambarkan seberapa besar perusahaan tersebut juga semakin besar. Jumlah pendapatan yang dihasilkan perusahaan dapat menunjukkan perputaran asset atau modal yang dimiliki oleh perusahaan (Mulyani, 2014).

Disamping itu persepsi pelaku UMKM juga mempengaruhi penggunaan SAK ETAP, setiap pemilik memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai penggunaan SAK ETAP. Persepsi masing-masing pemilik UMKM tentang SAK ETAP berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki (Dewi *et. al.*, 2017).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Dewi *et. al.*, tentang pengaruh sosialisasi SAK ETAP, tingkat pendidikan pemilik dan persepsi pelaku UKM terhadap penggunaan SAK ETAP. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Sosialisasi SAK ETAP, Tingkat Pendidikan Pemilik, dan persepsi pelaku UKM berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penggunaan SAK ETAP. Perbedaan penelitian ini yaitu objek, bidang usaha dan penambahan variabel penelitian. Pada penelitian ini memilih objek di Kota Pangkalpinang, objek UMKM serta penambahan variabel skala usaha.

Pangkalpinang merupakan pusat kota dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pentingnya penggunaan SAK ETAP pada setiap daerah namun, data dalam Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Pangkalpinang tidak mengharuskan pengusaha UMKM untuk melaporkan pencatatan laporan keuangan yang terjadi dalam usaha UMKM itu sendiri. Pengusaha UMKM kota Pangkalpinang banyak yang tidak melakukan pencatatan keuangan mereka hanya menyimpan nota-nota penjualan dan pembelian yang ada. Kebanyakan pengusaha UMKM tidak memisahkan uang pribadi dan uang usahanya sehingga mereka sendiri tidak tahu berapa kenyataan untung yang mereka dapatkan (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Pangkalpinang ; 2019)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha, Sosialisasi SAK ETAP, Skala Usaha Dan Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan SAK ETAP Pada UMKM kota Pangkalpinang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendidikan pengusaha dapat mempengaruhi penggunaan SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
2. Apakah dengan adanya sosialisasi dan Pemberian Informasi tentang SAK ETAP bisa mempengaruhi penggunaan SAK ETAP?
3. Bagaimana Pengaruh skala usaha terhadap penggunaan SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
4. Bagaimana Persepsi Pelaku Usaha dapat memengaruhi penggunaan SAK ETAP pada Usaha Mkro Kecil dan Menengah?
5. Bagaimana pengaruh Penggunaan SAK ETAP pada Usaha Mkro Kecil dan Menengah?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat, agar dalam penelitian adanya keterbatasan waktu dan jarak tempat penelitian. Penelitian ini hanya melakukan studi kasus pada UMKM di Pangkalpinang. Karena, data yang di dapat di DISPERINDAGKOP dan UMKM Kota Pangkalpinang hanya terdapat 4.104

UMKM yang sudah tercatat dan dibukukan, dimana dalam data tersebut hanya terdapat nama usaha, pemilik, alamat dan skala usaha, sehingga tidak mewakili metode pengambilan sampel penelitian yang penulis ambil. Oleh karena itu, penulis mengambil inisiatif untuk menggunakan Pemutakhiran Data Industri Mikro Kecil Menengah yang lebih lengkap.

Dalam penelitian ini penulis akan melihat apakah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah sudah menerapkan akuntansi dan SAK ETAP dalam penerapan akuntansi secara umum, artinya penulis hanya akan menanyakan dan melihat apakah pengusaha sudah membuat laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, bagaimana penyajian masing-masing pos yang ada dalam laporan keuangan apakah pengungkapannya sudah sesuai dengan SAK ETAP dan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha dalam penerapan akuntansi itu sendiri.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah tingkat pendidikan pengusaha dapat mempengaruhi penggunaan SAK ETAP pada usahanya.
2. Untuk menganalisis apakah dengan adanya sosialisasi dan Pemberian Informasi tentang SAK ETAP bisa mempengaruhi penggunaan SAK ETAP.
3. Untuk menganalisis bagaimana Pengaruh skala usaha terhadap penggunaan SAK ETAP pada usahanya.

4. Untuk menganalisis bagaimana Persepsi Pelaku Usaha dapat mempengaruhi penggunaan SAK ETAP pada usahanya.
5. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Penggunaan SAK ETAP pada Usaha Menengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1) Dapat menambah pengetahuan penulis tentang penerapan akuntansi dalam berbagai usaha dan menambah wawasan tentang SAK ETAP dan manfaat akuntansi dalam suatu usaha.
- 2) Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan UMKM.
- 3) Dapat menyadarkan pelaku UMKM betapa pentingnya penerapan SAK ETAP dalam usahanya.
- 4) Diharapkan dapat memberi kontribusi dan masukan bagi pemerintah untuk melakukan pelatihan akuntansi untuk UMKM yang baru berkembang, agar UMKM dapat lebih berdaya asing.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup teori-teori yang berhubungan dengan Tingkat Pendidikan, Sosialisasi SAK ETAP, Skala Usaha dan definisi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Persepsi Pelaku Usaha dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang ada di Indonesia (SAK ETAP).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian berupa pembahasan dan analisis deskriptif kuantitatif tentang Pengaruh SAK ETAP pada UMKM.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam perkembangan UMKM dan untuk penelitian selanjutnya.

